

The Implementation of the Scandinavian Model of Welfare State in the Swedish Economic Development

Implementasi Konsep *Scandinavian Model Of Welfare State* Dalam Perkembangan Ekonomi Swedia

Arum Tri Utami

Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak:

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana *welfare state* skandinavia menjadi salah satu faktor utama kemajuan ekonomi Swedia. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana Swedia menerapkan *welfare state* sebagai kebijakan ekonomi utama dari Swedia. *Welfare state* sendiri merupakan sebuah sistem dimana pemerintah mengambil peran kuat untuk mengurangi kesenjangan yang ada melalui berbagai program sosial. Swedia menerapkan *welfare state* secara komprehensif dengan menarik pajak yang tinggi kepada masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan berbagai program sosial. Masyarakat terbiasa dengan pajak yang tinggi karena mereka bisa mendapatkan manfaatnya dengan baik. Berbagai program yang terus dipertahankan oleh pemerintah adalah jaminan kesehatan bagi warga Swedia, bantuan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, bantuan kesehatan untuk anak, dan jaminan bantuan pensiun.

Kata-Kata Kunci: Welfare state, Swedia, Kemajuan Ekonomi.

Abstract:

This journal discusses how the welfare of the Scandinavian state became one of the main factors of Sweden's economic progress. The author uses qualitative methods to analyze how Sweden implements a welfare state as Sweden's main economic policy. The welfare state itself is a system where the government takes a strong role in reducing existing inequalities through various social programs. People are used to high taxes because they can get the benefits well. Sweden implements a comprehensive welfare state by collecting high taxes on the community and then channeling them back to the community with various social programs. Various programs that continue to be maintained by the government are health insurance for Swedish citizens, assistance to people who do not have jobs, health assistance for children, and pension assistance

Keywords: Welfare state, Swedia, Economic Progress

Korespondensi:

Arum Tri Utami (arum.tri@unsoed.ac.id)

Pendahuluan

Negara Skandinavia memperlihatkan model jaminan sosial yang matang dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Swedia sendiri sebagai salah satu negara Skandinavia, mengambil model *third way* yang menggabungkan antara keterbukaan ekonomi dengan kesejahteraan kapitalisme yang dipadukan dengan redistribusi dan *safety net* dari sosialisme (Eric & Logue, 2003). Kesuksesan yang didapatkan oleh Swedia ini menurut Gunnar dan Alvar, sebagai satu pencetus dari *welfare state* sistem yang ada di Swedia, dikarenakan oleh masyarakatnya yang homogen, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintahannya. Negara ini tidak pernah mengalami periode feodal dan pemerintahannya selalu mengizinkan adanya representasi yang berasal dari masyarakat, petani juga memiliki lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat Swedia melihat pemerintah sebagai otoritas yang merupakan bagian dari masyarakat. Faktor lain adalah adanya layanan sipil yang efisien dan bebas dari korupsi. Adanya etos kerja yang tinggi. Orang akan bekerja keras walaupun pajak penghasilannya meningkat yang nantinya diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Hal tersebut membuat Swedia memiliki tenaga kerja yang terdidik dan sektor ekspor yang kuat (Adler, 1967). Kayu, tenaga air, dan bijih besi adalah sumber utama penghasilan negara, barang yang dihasilkan dari industrinya adalah kendaraan bermotor, telekomunikasi, farmasi, mesin industri, peralatan presisi, barang kirmia, berbagai peralatan rumah tangga seperti yang terlihat pada gambar.1. Perusahaan swasta mendominasi aktivitas ekonomi di Swedia. Negara ini memiliki sistem *welfare state* terbesar dan paling berkembang di dunia, sistem ini dibiayai oleh pajak yang sangat tinggi. Sistem perpajakan yang tinggi ini dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata untuk penduduknya melalui program sosial atau sering disebut sebagai *nordic model*. Pengeluaran pemerintah menyumbang lebih dari separuh PDB, adanya rezim pajak yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Adanya aset institusional seperti tingkat efisiensi dan transparansi bisnis yang tinggi telah menyeimbangkan pengeluaran sosial yang besar (Adler, 1967, p. 80).

Swedia sebagai salah satu negara dengan perekonomian besar di dunia membuatnya menjadi negara yang paling diperhatikan di dunia, serta adanya

Korespodensi:

Arum Tri Utami (arum.tri@unsoed.ac.id)

sistem *welfare state* yang membuat masyarakatnya menjadi sejahtera. Swedia sendiri memiliki kebijakan ekonomi yang berjalan baik dan efisien, kebijakan ekonomi pasar yang terbuka mendukung adanya fleksibilitas, daya saing, arus perdagangan, dan investasi yang besar. Lingkungan peraturan yang transparan dan efisien mendorong aktivitas kewirausahaan yang kuar. Adanya peraturan perbankan yang masuk akal dan pemberian pinjaman dengan hati-hati, membuat ekonominya menjadi stabil. Selain dari segi ekonomi, sistem hukum memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan, sehingga dapat mendukung efektivitas peradilan dan integritas pemerintahan. Kemajuan yang dialami oleh Swedia menjadikannya sebagai salah satu negara Skandinavia yang banyak menjadi percontohan di dunia, sehingga menarik untuk dibahas. Swedia sebagai salah satu negara yang tergabung didalam Uni Eropa memiliki model ekonominya sendiri yang mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya (Daniel, 2009).

Konsep Welfare State

Welfare state atau dapat diartikan sebagai negara kesejahteraan merujuk pada konsep dimana negara memegang peranan utama dalam melindungi dan menjunjung kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduknya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan peluang, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab bersama untuk membantu mereka yang tidak mampu mencapai standar kehidupan yang layak, dan mencakup berbagai bentuk organisasi sosial maupun ekonomi. Paul Spicker mendefinisikannya sebagai sebuah keadaan ideal dimana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik. Dari definisi yang diberikan oleh ahli seperti James Midgley, Martin B. Tracy, Michelle Livermore, dan Neil Thomson, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan memiliki empat konsep utama, yakni (Joel, 1989):

1. Kesejahteraan dalam artian terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik material maupun non material.
2. Pemberian pelayanan sosial.
3. Tunjangan sosial, yang citranya menjadi buruk karena menjadi identik dengan ketergantungan kaum miskin dan tertinggal terhadap pemberian dari negara.

4. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian tunjangan dan pelayanan sosial.

Goran Adamson memberikan pendapat lain mengenai empat hal yang harus disediakan oleh *welfare state* bagi rakyatnya (Joel, 1989, p. 300):

1. Menciptakan keamanan.
2. Mensuplai pelayanan sosial.
3. Mengurangi biaya sosial masyarakat.
4. Mengontrol angka reproduksi.

Jika merujuk pada buku *Talking Policy: How Social Policy in Made*, maka awal ide *welfare state* dimulai pada abad 18 dan digagas oleh Jeremy Bentham, yang menggunakan istilah kegunaan untuk menggambarkan konsep kesejahteraan (prinsip utilitarianisme). Baginya, pemerintah harus selalu menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan. Bentham dijuluki sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” berkat gagasannya mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi, dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial. Sir William Beveridge memiliki peranan penting dalam menyebarkan konsep *welfare state*, terutama di negara asalnya, Inggris. Dalam laporannya yang berjudul *Beveridge Report*, Beveridge menyebut *the five giant evils* sebagai ancaman yang harus dilawan. Mereka adalah (Chauncey, 1987):

1. *Want* (keinginan)
2. *Squalor* (kemelaratan)
3. *Ignorance* (ketidakpedulian)
4. *Disease* (penyakit)
5. *Idleness* (kemalasan)

Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari saat ia lahir sampai saat ia meninggal (*from cradle to grave*). Namun, sistem ini memiliki kelemahan. Karena pelayanan asuransi berdasarkan pada premi, mereka yang tidak mampu membayar premi karena tidak mendapat pemasukan, seperti orang lanjut usia, orang yang memiliki cacat yang parah, dan pengangguran, tidak akan dapat menerima perlindungan dari asuransi. Ada pula opini lain dari Marshall yang menyatakan bahwa kesejahteraan orang lain juga menjadi tanggungjawab sesama masyarakat dan diwujudkan melalui negara (Jill, 1987).

Dalam penerapannya sendiri, terdapat empat model yang masih berlaku sampai sekarang (Jill, 1987, p. 115).

- Model universal

Pelayanan sosial diberikan oleh pemerintah negara bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin. Hal ini dilakukan oleh negara – negara Skandinavia, seperti Swedia dan Finlandia. Bahkan, sistem *welfare state* Swedia disebut sebagai sistem yang terbaik dibandingkan dengan negara lain.

- Model Korporasi

Mirip seperti model pertama, dimana layanan diberikan pada seluruh masyarakat, namun di model ini ada tiga pihak yang memberi kontribusi. Tidak hanya pemerintah, melainkan juga dunia usaha dan para pekerja, dan dilakukan di Jerman dan Austria. Sistem ini ditemukan oleh Otto Von Bismarck, sehingga sering juga disebut Model Bismarck.

- Model residual

Pelayanan kebutuhan dasar sosial hanya diberikan terbatas pada masyarakat kurang beruntung, seperti orang miskin muda maupun tua, penyandang cacat, dan pengangguran. Perlindungan dan pelayanan yang diberikan relatif lebih ketat, temporer, dan efisien. Dilaksanakan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

- Model minimal

Seperti namanya, model ini berarti dana yang dialokasikan pemerintah dalam melaksanakan *welfare state* masih sangat kecil dan minim. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial, minimal, dan biasanya hanya bagi mereka yang mampu membayar premi. Sistem ini ada di negara seperti Indonesia, Brazil, dan Spanyol.

Perkembangan Kebijakan Ekonomi Swedia

Swedia dikenal dengan modernisasinya yang cepat dan sukses. Swedia memasuki era modern dengan langkah kuatnya yaitu dari negara agraris berubah menjadi negara industri yang lebih kuat secara ekonomi. Modernisasi didorong oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, demokratisasi, peningkatan perencanaan sosial, dan standar kehidupan yang lebih baik. Setelah mengalami

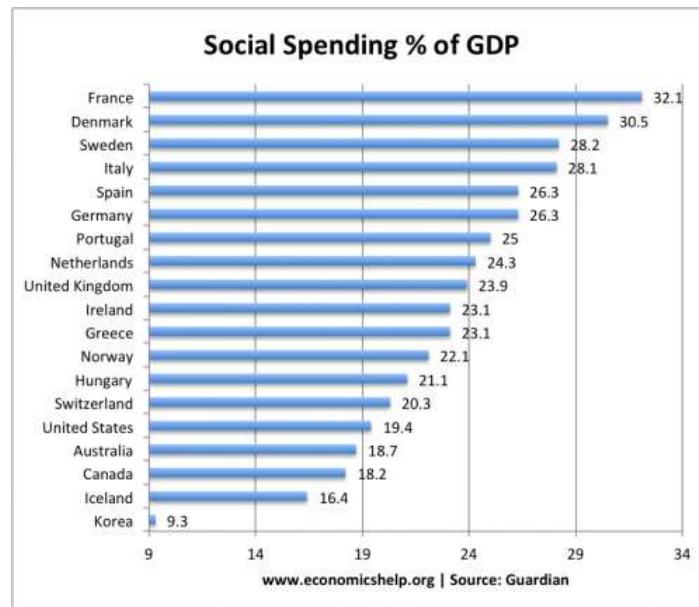
berbagi masalah di dalam negeri pada tahun 1800an, Swedia membuat suatu terobosan untuk era modern di negara-negara nordik, yang disebut sebagai periode pencerahan, fokus utamanya pada bidang sosial. Adanya peningkatan perhatian dari para ilmuwan dan kelas menengah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Swedia, yang disebut sebagai *eugenicis movement*. Gerakan ini mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Swedia (Brochmann, 2012).

Kisah sukses ekonomi Swedia dimulai pada akhir abad ke 19 setelah adanya pergeseran politik menuju pasar bebas dan perdagangan bebas. Pada saat itu Swedia mulai mengeksplorasi besi, baja dan kayu. Antara tahun 1860 dan 1910 terjadi peningkatan upah riil pekerja pabrik yaitu sekitar 25 persen per dekade, serta belanja negara tidak mencapai 10 persen dari PDB. Tahun 1930 menjadi tahun penting bagi Swedia karena pada tahun itu pemerintah mengatakan akan menerima sebuah modernisasi (Brochmann, 2012, p. 71).

Partai Sosial Demokrat telah menguasai Swedia sejak tahun 1932. Partai tersebut menjadi partai kelas menengah dengan menciptakan sistem jaminan sosial yang memberikan jaminan kepada pensiun, pengangguran serta tunjangan kepada pekerja yang sakit. Sebagian besar keuntungan dari pajak yang diberikan sebanding dengan yang diterima, sehingga kelas menengah mendukung sistem tersebut. Pemerintah tidak mengatur pada sistem pasar yang berjalan, tetapi mengatur mengenai pajak penghasilan yang digunakan untuk *welfare*. Pada pertengahan tahun 1930an, Swedia mengambil sebuah jalan tengah dengan menggabungkan skala kecil, solusi rasional dengan penghormatan terhadap individu, dan adanya gerakan kerjasama (Richard, 2010).

Kemudian partai Demokrat Sosial mulai melakukan radikalisme, dengan adanya peraturan pajak dan tenaga kerja yang diperketat. Belanja publik meningkat dari 31 persen menjadi 60 persen dari tahun 1975 sampai 2000. Hal ini membuat pendapatan per kapita tumbuh tidak lebih dari 43 persen pada periode antara 1875 sampai 2000. Pada tahun 2000, Swedia di urutan ke 14 dalam peringkat pendapatan perkapita menurut OECD, seperti yang terlihat pada grafik.1 (Richard, 2010, p. 106).

Grafik.1 Pengeluaran Sosial dari GDP



Sumber : Guardian

Pemerintah melakukan pergeseran kebijakan ekonomi yang hati-hati pada awal tahun 1970an. Adanya peningkatan upah pekerja pada tahun 1970an. Yang dimaksud dengan *the politic of purpose* adalah adanya perubahan kebijakan dengan mempertimbangkan kembali norma-norma yang menentukan dari tujuan otoritas politik yang ada. Orang Swedia berperilaku dengan cara tertentu hal tersebut yang disebut sebagai norma yang kemudian akan membentuk kebijakan ekonomi di Swedia. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1980an, norma yang membentuk budaya politik Swedia berubah. Perubahan itu adalah bahwa negara harus menyelesaikan berbagai masalah sosial dan adanya dorongan untuk reformasi sosial yang menyebabkan adanya perluasan lingkup kerja pemerintah. Norma yang ada menekankan Swedia untuk memecahkan masalah sosial yang ada. beberapa langkah yang dilakukan adalah (Can Sweden be Shrunk?, 1979) :

- Adanya norma kemitraan sosial
Kebijakan yang dikembangkan bersama dengan organisasi kepentingan sosial. Pemerintah yang kuat adalah jika dapat menghadapi organisasi kepentingan yang kuat.
- Adanya norma sentralisasi
Birkorasi negara yang berkuasa bertanggung jawab atas bidang kebijakan tertentu seperti kebijakan pada bidang pendidikan, sosial, perumahan,

pasar tenaga kerja, dan adanya sistem penyelidikan pemerintah yang terpusat dengan menyediakan landasan intelektual pada program kebijakan

- Adanya norma integrasi
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menarik pada arah yang sama, saling menguatkan, dan menambah upaya reformasi sosial yang dipimpin oleh negara.

Secara keseluruhan tujuan utama kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah Swedia adalah untuk menciptakan tingkat kesejahteraan setinggi mungkin dengan memberikan kontribusi terhadap (Economic Policy Objectives , 2017) :

- Tingkat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi (melalui kebijakan struktural)
- *Welfare state system* yang dapat menguntungkan semua orang (melalui kebijakan distribusi)
- Tingkat utilisasi sumber daya yang stabil (melalui kebijakan stabilisasi)

Tanggung jawab negara adalah merencanakan, mengatur dan membiayai kesehatan sosial. Fase ketiga dari *welfare state* terjaid pada pertengahan tahun 2000an yaitu dengan adanya perubahan kondisi pasar global. Hubungan antara negara nasional dan pasar berfungsi untuk mempromosikan negara dan pasar sebagai institusi sosial yang dominan.

Perubahan kebijakan ekonomi Swedia menurut berbagai ilmuwan dijelaskan dengan mengacu pada karakteristik struktural atau institusional ekonomi politik Swedia dan pengorganisasian pasar tenaga kerja. Lembaga perundangan upah di Swedia memang terdesentralisasi pada tahun 1980an. Swedia menghapuskan kontrol devisa, tidak mencegah pemerintah Swedia untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi pada tahun 1970an dan 1980an. Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995. Pemerintah Swedia melihat sistem politik sebagai model yang koheren, bukan hanya seperangkat kebijakan individual. Hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa Swedia mengubah kebijakannya lebih lambat daripada kebanyakan negara Eropa lainnya (Daniel, 2009).

Sistem *Welfare State* Swedia

Welfare state modern adalah sebuah model pembangunan yang mulai muncul pada tahun 1989. Jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin secara fundamental mengubah *balance of power* di Skandinavia, sehingga memungkinkan Finlandia dan Swedia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Imigrasi mengubah Skandinavia yang dulunya homogen menjadi masyarakat dengan keragaman ras, agama, etnis dan bahasa. Model Sosial Demokrat Skandinavia menawarkan kapitalisme dengan lebih manusiawi, yaitu dengan adanya *welfare state* redistributif yang digunakan untuk menghilangkan kemiskinan yang didasarkan pada kepemilikan pribadi dan ekonomi pasar. Adanya transfer payment dan layanan sosial yang digunakan untuk menaikkan standar hidup dari kelas yang rendah dan *middle class*. Adanya beban pajak yang tinggi, pemerintah berusaha mengatur ekonomi nasional dengan membatasi adanya *countercyclical* pada sektor publik. Sehingga dibutuhkan kekuatan negara untuk mempromosikan politik, sosial, dan ekonomi egalitarianisme (Caroline, 2000).

Dalam model *welfare state* yang diterapkan oleh Swedia, adanya pembagian dalam kelompok masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin dan sektor ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk membedakan porsi bantuan sosial yang akan didapatkan dari berbagai program sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Karakter *welfare state* universal adalah adanya kecenderungan pembagian divisi kelas, tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, berbagai layanan sosial biasanya lebih banyak diberikan kepada perempuan karena dianggap perempuan lebih bergantung dibandingkan laki-laki (Jonas, 2006). Salah satu ciri dari *welfare state* adalah keterlibatan dari perempuan di berbagai jenis pekerjaan dalam suatu negara. Hal ini terlihat di Swedia, dengan banyaknya perempuan yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan di Swedia. Pertumbuhan *welfare state* di Swedia mengurangi hambatan terhadap pekerja perempuan terutama melalui perubahan kelembagaan yang inovatif. Setelah resesi yang dialami Swedia pada tahun 1990an membuat pemerintah secara aktif meningkatkan jumlah siswa yang memiliki pendidikan tinggi. Kebijakan ini membuat tingkat perempuan perempuan juga menjadi lebih tinggi, *Public employment* telah menyumbang sepertiga dari pekerjaan yang ada di Swedia

sampai dengan saat ini. Pertumbuhannya yang cepat membuatnya menjadi salah satu indikator keberhasilan dari *welfare state* (Jonas, 2006, p. 389).

Sistem *welfare state* Swedia sekarang ini dimulai dengan adanya pergeseran kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif menjadi perluasan layanan sosial dan pemerataan gender pada tahun 1970an dan 1980an. Layanan sosial dan kesehatan diberikan, serta adanya skema terkait pendapatan yang mencakup seluruh populasi pekerja yang dibuat setelah Perang Dunia. Prinsip *welfare state* yang diterapkan oleh Swedia bahwa kesejahteraan individu adalah tanggung jawab bersama. Warga negara Swedia memiliki hak atas kesejahteraan sosial. Distribusi kesejahteraan yang dibiayai oleh pajak, didasarkan pada prinsip kesetaraan. Model *welfare state* yang ada di Swedia adalah basis modernitas Swedia yang mendapat dukungan dari warga Swedia. Prinsip khas *welfare state* yang ada di Swedia saat ini adalah universalisme dan demodifikasi. Prinsip universalisme karena kualitas bantuan sosialnya merupakan sebuah kebijakan komprehensif dan meluas. Landasan *welfare state* Swedia adalah asuransi sosial yang beroperasi untuk populasi pekerja, pelayanan sosial, dan bantuan sosial. Komponen dasar sistem bantuan sosial di Swedia adalah pensiun, asuransi kesehatan, asuransi orang tua, dan asuransi pengangguran pada awalnya. Kebijakan ini dimulai dengan adanya reformasi pensiun pada tahun 1948 (F, 2005).

Swedia telah mencapai salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan yang dihasilkan oleh ekonomi Swedia memungkinkan model *welfare state* ini menjadi tumbuh dan berkembang. Seluruh pengeluaran pemerintah dibiayai oleh pajak, semua pajak yang ada di kumpulkan dari individu sehingga dapat memandu perilaku individu. Pajak yang berasal dari penilaian pajak barang dan jasa berbeda dari biaya sosial. Besarnya sektor publik diperhitungkan dari pengeluaran dan sisi pajak. Besaran pajak yang ada sekarang lebih kecil dibandingkan dahulu, karena beberapa tahun yang lalu, pajak yang dikeluarkan bisa mencapai 70 persen.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah diambil dari pajak yang tinggi. Baik perempuan dan laki-laki di Swedia lebih banyak mengeluarkan pada sektor rumah tangga dibandingkan membeli barang di pasar. Seperti misalnya, jika adanya pajak sebanyak 50 persen, perempuan di Swedia mendapatkan SKr 120,000 pada pasar tenaga kerja, dan harus membayar sebanyak SKr 60,000

untuk perawatan anak, sehingga mendapatkan keuntungan balik yang sedikit. Adanya tempat penitipan anak bagi perempuan yang bekerja, hal ini dapat meningkatkan *social welfare*. Sistem pajak yang tinggi dan tunjangan *welfare* telah lama ada di Swedia. Pemberian jaminan sosial pada kelas menengah (Still Corporatism in Scandinavia? A Survey of Recent Findings, 2000).

Swedia memiliki sistem kepemilikan publik yang lebih maju dibandingkan dengan negara lainnya. Sumber daya alam yang ada di Swedia sebagian besar di tangan swasta, sedangkan industri dan perdagangan diatur oleh pengelolaan dan kepemilikan pribadi. Sektor industri dimiliki 28 persen oleh negara dan sisanya merupakan kepemilikan bersama. Sedangkan tambang dikelola oleh sektor swasta. Jalur kereta api dikelola oleh pemerintah dan bekerjasama dan dioperasikan oleh publik. Untuk sektor perumahan 90% berada di tangan swasta. Masalah utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah sektor kesehatan dan ketidakmerataan. Tugas dari negara adalah untuk memastikan bahwa warganya memperoleh sandang, pangan dan papan, serta mendapat jaminan kesehatan dan hari tua. Pemerintah juga mendorong untuk adanya kebebasan dalam masyarakat (Brochmann, 2012).

Adanya reformasi sosial yang dilakukan untuk kesejahteraan sosial. Reformasi yang dilakukan menempatkan Swedia di garis depan perkembangan politik sosial yang paling maju di dunia. Menteri Kesejahteraan Sosial Swedia, Gustav Moller memberikan masukan yang besar mengenai usia 67 tahun yang diberikan pensiun pada Oktober 1951. Sistem *welfare state* yang ada di Swedia lahir dari beberapa tokoh seperti Gustav Moller, Agustus Lindgber (kepala federasi buruh), Per Ablin Hansson (perdana menteri), dan Albin Johansson (pemimpin gerakan kooperatif). Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tidak ada warga negara yang merasa menderita sepanjang hidupnya. Adanya standar hidup yang layak bagi setiap warga negara Swedia. Sepersepuluh dari pendapatan nasional dihabiskan untuk beberapa bentuk jaminan sosial (Welfare State Retrenchment Revisited : Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies, 2000).

Lebih dari 75% anggaran yang didapatkan oleh pemerintah berasal dari pajak penghasilan dan pajak tidak langsung. Sampai sekarang ini, pemerintah menghabiskan sekitar sepertiga dari total pendapatan untuk jaminan sosial. Pada Agustus 1951, Gustav Moller, membuat adanya program kesejahteraan

sosial dengan menambahkan 400 juta kronor pada anggaran pemerintah untuk tahun 1953-1954. Moller meluaskan bantuan sosial ke ranah perumahan dan pendidikan. Adanya penyesuaian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan warga negara dan harga sewa yang akan diberikan. Adanya dukungan mengenai keketatan wajib belajar (Adler, 1967, p. 32).

Tunjangan untuk janda, anak-anak, persalinan, serta pinjaman bagi pasangan muda yang sudah menikah. Prinsip yang ada pada undang-undang sosial yang ada di Swedia adalah memberikan setiap warga negara bantuan dan perlindungan yang merupakan hak mereka sebagai anggota masyarakat. Beberapa bantuan sosial yang diberikan adalah pemberian bantuan finansial kepada keluarga dengan jumlah anggota yang banyak, pensiun hari tua, dan asuransi. Adanya jaminan sosial untuk kesehatan serta kesejahteraan untuk anak. Dua hal tersebut terus menjadi perhatian utama dari pemerintah Swedia. Beberapa bantuan moneter yang diberikan oleh pemerintah seperti adanya pinjaman dengan bunga yang rendah untuk perbaikan rumah dan pinjaman kepada pasangan yang baru menikah untuk perabotan rumah. Adanya pembangunan rumah susun untuk keluarga yang memiliki jumlah anggota yang banyak, bantuan pemerintah untuk warga negara yang memiliki penghasilan yang rendah, serta potongan harga sewa diluar anak pertama dan kedua. Sehingga dari tahun 1935 sampai 1939 slogan yang ada adalah “empat anak untuk setiap rumah”. Dengan adanya undang-undang tersebut maka tingkat kelahiran mulai meningkat (Brochmann, 2012, p. 38).

Pemerintah mendirikan berbagai pusat kesehatan untuk anak-anak di Swedia. Jika ibu yang baru melahirkan masih dalam kondisi yang lemah maka pada tahun 1950 negara akan memberikan gaji bagi asisten rumah tangga. Adanya pusat-pusat kesehatan untuk anak sampai dengan umur 14 atau 15 tahun. Orang tua dapat memeriksakan anaknya secara berkala dengan biaya gratis pada pusat-pusat kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Negara menjamin adanya biaya yang rendah untuk memeriksakan anaknya setiap tahunnya bagi keluarga yang memiliki penghasilan yang mencukupi. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki penghasilan yang rendah maka tidak ada biaya sama sekali untuk melakukan perawatan bagi anaknya.

Bentuk lain program kesehatan nasional yang dilakukan negara adalah dengan memberikan makan siang gratis untuk semua anak sekolah. Makan siang

tersebut terdiri dari hidangan yang bergizi dengan satu roti dan susu. Untuk negara dengan tingkat penghasilan tertentu negara memberikan biaya yang gratis untuk anak-anaknya dapat pergi berlibur. Tempat berlibur yang disediakan oleh negara adalah kamp-kamp liburan yang diawasi oleh beberapa orang dengan usia yang muda dan dijalankan oleh pemerintah. Pada kamp tersebut disediakan tenaga kerja ahli yang memberikan program bermain serta prinsip-prinsip kehidupan yang sehat. Semua langkah tersebut berguna untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan anak bangsa telah mendapatkan dukungan penuh dari semua kelompok masyarakat. Dalam hal kesejahteraan anak, semua partai politik yang ada di Swedia telah memiliki kesepakatan yang sama sejak awal. Adanya perawatan medis pada daerah terpencil dengan biaya rendah. Pemerintah memberikan beberapa obat secara gratis dan obat tertentu dengan harga yang lebih rendah. Hal tersebut menjadikan Swedia sebagai negara dengan standar kesehatan orang dewasa yang paling tinggi di dunia. dengan adanya jaminan kesehatan yang tinggi, membuat usia harapan hidup di Swedia juga tinggi (Baners , 2000).

Kebijakan ekonomi Swedia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melalui berbagai program *welfare state* yang ada dibawah *Ministry of health and social affairs* dengan beberapa area yang mereka konsentrasikan yaitu : demokrasi dan hak asasi manusia, persamaan gender, *health care, public health and sport, social care, dan social insurance* (Ministry of Health and Social Affairs, 2017). Perawatan kesehatan misalnya mencakup tindakan yang dilakukan untuk merawat orang-orang yang sakit dan pengembangan layanan perawatan kesehatan. Perhatian yang diberikan sifatnya harus adil, adanya kesetaraan gender, mudah untuk diakses, dan adanya persyaratan yang sama sesuai dengan kebutuhan (Caroline, 2000).

Walaupun masyarakat Swedia yang bekerja wajib membayar pajak yang tinggi, tetapi pemerintah memberikan tunjangan sesuai dengan yang mereka keluarkan, sehingga adanya prinsip semakin tinggi pendapatannya, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan dengan berbagai program bantuan dan tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah Swedia. Semua orang memiliki hak yang sama dalam hal jaminan sosial. Biasanya orang yang bekerja akan mendapatkan keuntungan berupa tunjangan anak, pensiun, kesehatan dan berbagai tunjangan sosial lainnya. Sedangkan untuk

pengangguran, tunjangan yang diberikan hanya tunjangan ppengangguran setiap bulannya. Tunjangan sosial didistribusikan sesuai dengan prinsip kebutuhan (Caroline, 2000, p. 16).

Kemajuan Ekonomi Swedia

Swedia sebagai salah satu negara Skandinavia merupakan negara dengan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Swedia berubah dari negara agrikultur yang miskin menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Perubahan dari pertanian menjadi industri adalah masa paling penting yang mengawali kemajuan Swedia (History of Sweden, 2017). Pada abad 19, Swedia memulai proses industrialisasi. Pada saat revolusi industri dimulai, negara ini adalah negara yang miskin. Pada pertengahan abad 19, reformasi ekonomi dan kenaikan upah untuk pekerja membuat adanya sistem manajemen ekonomi yang lebih modern sehingga membuat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh Swedia sampai dengan sekarang ini. Kemudian pada tahun 1930an, Swedia menjadi negara dengan standar hidup tertinggi didunia.

Pada tahun 1970, Swedia menjadi negara dengan posisi ketiga dengan PDB per kapita paling tinggi. Pada tahun 1990an Swedia mengalami krisis yang paling buruk. Sehingga membuat adanya perubahan kebijakan ekonomi termasuk dalam bidang sistem *welfare state*. Setelah adanya perbaikan kebijakan ekonomi, pada tahun 2009, Swedia mmendapatkan PDB kesepuluh tertinggi di dunia. Swedia tetap menjalankan sistem ekonomi campuran yang berorientasi pada ekspor. Perusahaan swasta menjadi mayoritas industri di Swedia.

Menurut OECD adanya deregulasi, globalisasi, pertumbuhan di sektor teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Swedia. Pekerja di Swedia hanya membawa pulang 40% dari penghasilannya, karena besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak tersebut sebenarnya telah menurun sejak tahun 1990an tetapi masih termasuk yang paling tinggi di dunia. pekerja di sektor pemerintahan merupakan sepertiga dari angkatan kerja yang ada di Swedia. Hampir 70 persen pekerja Swedia masuk ke dalam serikat pekerja. Negara ini tidak memiliki upah minimum. Swedia terus menggunakan Krona Swedia (SEK) sebagai mata uangnya, setelah menolak Euro pada tahun 2003. Menurut *Heritage's 2015 Index of Economic Freedom*, nilai kebebasan ekonomi

Swedia pada tahun 2015 adalah 72,7 yang menjadikannya sebagai ekonomi yang paling bebas ke 23 di antara negara lain di dunia (Sweden , 2018).

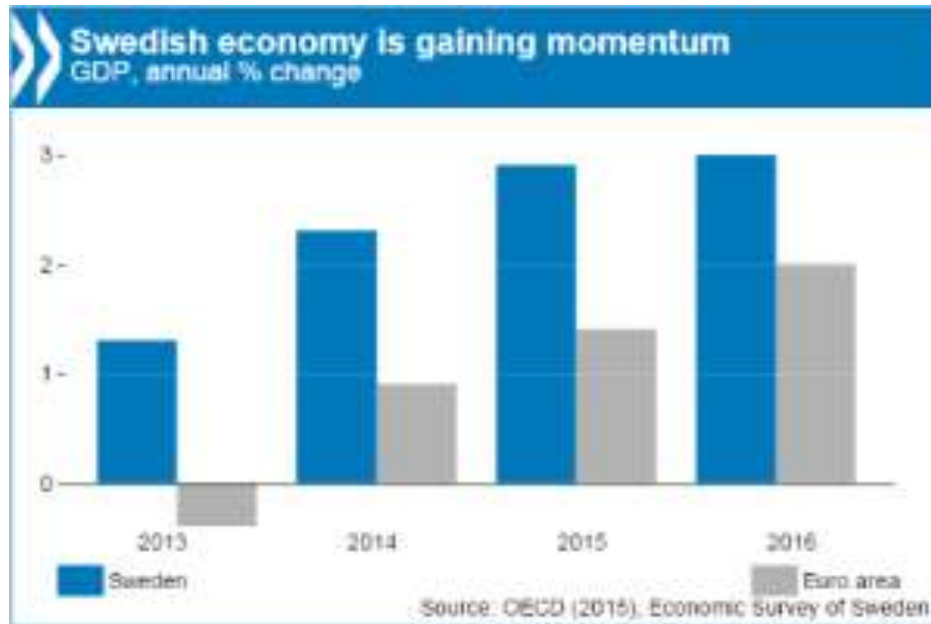
Perkembangan ekonomi Swedia diperkirakan tetap cerah walaupun adanya ancaman dari *bubble economy*. Swedia mengumumkan adanya rencana ekonomi pada bulan April 2015 untuk menekan tingkat pengangguran pada tahun 2018. Beberapa rencana tersebut mencakup pemotongan suku bunga nasional, kenaikan pajak. Langkah ini dipercaya dapat mengurangi pengangguran serta memberikan tambahan anggaran negara. Sejak krisis tahun 1990an, pemerintah Swedia telah membuat berbagai inovas tata kelola ekonominya. Perama pada tahun 1996 dikenalkan adanya batasan untuk belanja pemerintah (*utgiftstak*). Yang disertai dengan adanya penambahan *surplus goal* (*överskottsmålet*) untuk anggaran pemerintahl. Reformasi ini mendapat dukungan luas dari politik Swedia.

Kemudian pada tahun 2007 Dewan Kebijakan Fiskal Swedia (*Finanspolitiska rådet*) didirikan. Dewan ini bertugas untuk melakukan audit dan bertujuan untuk memastikan bahwa negara tetap konsisten dengan tujuan pertumbuhan, lapangan kerja dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Swedia telah menurunkan pajaknya, serta adanya investasi di bidang kesehatan, pendidikan dan penelitian. Dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan menjadikan Swedia sebagai negara keenam paling kompetitif di dunia. Ciri utama dari ekonomi Swedia adalah keterbukaan dan liberalisasi perdagangan. Swedia yang berorientasi pada ekspor memiliki surplus perdagangan yang besar. pertumbuhan sektor jasa seoerti teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang kuat di Swedia (Al-Wahab, 2000).

Stockholm adalah salah satu kota start up yang paling unggul di Eropa sehingga dapat mengundang banyak perusahaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi masuk ke Swedia. Pusat ekonomi Swedia yang tadinya hanya di Stockholm sekarang lebih luas penyebarannya. Adanya pemerataan kekayaan di berbagai wilayah di Swedia, termasuk yang paling merata dibandingkan dengan negara lain di Uni Eropa. Ekonomi yang dinamis dan standar kehidupan yang tinggi bisa ditemukan di seluruh wilayah negara. hal ini diperoleh setelah adanya perbaikan setelah krisis ekonomi tahun 1990an. Dengan perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan membuat Swedia sebagai contoh model kesuksesan ekonomi di dunia. GDP yang diperoleh Swedia dianggap salah satu

yang paling tinggi diantara negara *eurozone*, seperti yang terlihat dalam Grafik.2 (Sweden Economy, 2018).

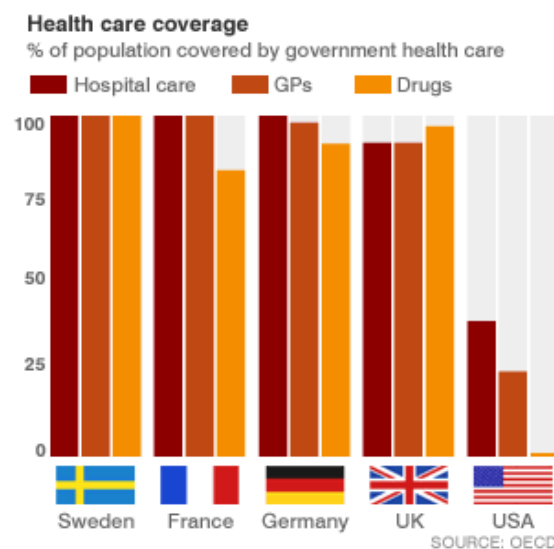
Grafik.2 GDP Swedia dengan negara *eurozone*



Sumber: <http://www.oecd.org/eco/outlook/sweden-economic-forecast-summary.htm>

Swedia adalah salah satu negara yang jumlah penduduknya paling banyak dilindungi oleh pemerintah dalam berbagai bentuk bantuan sosial seperti yang terlihat pada tabel berikut grafik berikut ini

Grafik.3. Dana Kesehatan yang Dijamin Pemerintah



Swedia adalah negara yang selalu masuk ke dalam sepuluh besar negara yang masyarakatnya sejahtera. Swedia secara konsisten masuk ke dalam sepuluh besar global untuk kemakmuran masyarakatnya. Misalnya saja pada tahun 2016, Swedia menempati urutan ke 8 dari 149 negara didunia. Swedia memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di eropa. Pemerintahan yang konsisten juga menempati urutan ke lima. Sedangkan dalam hal indeks kesehatan yang, Swedia naik dari peringkat 8 ke 6 di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya harapan hidup dan kepuasan terhadap pelayanan dan perawatan kesehatan pada masyarakat (Sweden Prosperity Index, 2018).

Kesimpulan

Swedia sebagai salah satu negara Skandinavia yang juga merupakan anggota Uni Eropa adalah sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara ini menerapkan ekonomi yang berbeda dengan yang lainnya, dimana Swedia membuka ekonomi seperti negara liberal lainnya, tetapi masih adanya kontrol yang kuat dari pemerintahnya di berbagai bidang. Salah satu bidang yang masih menjadi pusat perhatian pemerintah adalah bidang sosial. Melalui berbagai bantuan dan program sosial kesehatan, pemerintah mencoba untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Karena tujuan utama dari pemerintah adalah kesejahteraan setiap individu di negaranya. Menurut pemerintah, kesejahteraan adalah tugas bersama yang harus diwujudkan. Berbagai program dan bantuan sosial diberikan pemerintah dengan menarik pajak yang tinggi dari masyarakat sesuai dengan penghasilan dan pekerjaan yang mereka peroleh.

Masyarakat Swedia membayar pajak yang tinggi secara sukarela karena menganggap pemerintah adalah sebageian dari mereka, serta masyarakat telah merasakan manfaat dari berbagai program yang diberikan oleh pemerintah. Berbagai program yang terus dipertahankan oleh pemerintah adalah jaminan kesehatan bagi warganya, dana untuk pengangguran, dana kesehatan untuk anak, serta jaminan dana pensiun. Program-program ini dibuat untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Berbagai program yang dibuat ini sendiri tergabung dalam sebuah *welfare state* yang berkesinambungan dan efisien. *Welfare state* sendiri adalah sebuah sistem dimana negara yang mengambil peran kuat untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Swedia melakukan sistem *welfare state* universal yang mencakup semua sisi kehidupan masyarakatnya. Melalui berbagai program *welfare state*, Swedia terbukti menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia. Sudah seharusnya berbagai negara melakukan hal yang dengan Swedia, walaupun programnya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, tetapi yang terpenting adalah tujuan utama pemerintahnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jika berbagai program ditujukan oleh pemerintah maka berbagai masalah yang ada di negara tersebut menjadi terselesaikan. Masyarakat juga merasa percaya sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan tujuan tersebut, tidak adanya berbagai kasus korupsi karena fokus pemerintah adalah rakyat.

Daftar Pustaka

- Adler, K. (1967). *Functional Socialism : A Swedish Theory for Democratic Socialization*. Stockholm: Prisma.
- Al-Wahab, I. (2000). *The Swedish Institution of Ombudsman : An Instrument of Human Rights*. Stockholm: Liber.
- Baners , H. (2000). *Sweden : Wanja Tackles Wage System*. Sweden: Financial Times.
- Brochmann, G. (2012). *Imigration Policy and The Scandinavian Welfare State 1945-2010*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Can Sweden be Shrunk?* (1979). United Kingdom: Development Dialogue.
- Caroline, A. (2000). Women and the Welfare State. *Canadian Journal of Politics Science*, 4, 69.
- Chauncey, A. A. (1987). Welfare State? *Social Work*, 32, 94.
- Daniel, A. (2009). *The Swediash Welfare Moder : Counter Argument to Neoliberal Myths and Assertions*. London: Association of Heterodox Economic.
- Economic Policy Objectives* . (2017, Mei 20). Retrieved from Economic policy : <http://www.government.se/government-policy/economic-policy/economic-policy-objectives/>
- Eric, E. S., & Logue, J. (2003). *Modern Welfare State : Scandinavian Politics and Policy in the Global Age*. United State of America: Praeger Publishers.
- F, F. T. (2005). *An Introduction to the Swedish Welfare State*. Istanbul: Istanbul Ticaret University.
- History of Sweden*. (2017, Juni 3). Retrieved from <http://www.heritage.org/index/country/sweden>
- Jill, Q. (1987). Theories of the Welfare State. *Annual Review of Sociology*, 13, 113.
- Joel, B. (1989). Theories of The Welfare State. *Social Service Review*, 63, 27.
- Jonas, E. (2006). Trust in the Capability of the Welfare State and General Welfare State Support: Sweden. *Avcta Sociologica*, 49, 400.

- Ministry of Health and Social Affairs*. (2017, Mei 21). Retrieved from Ministry of Health and Social Affairs: <http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/>
- Richard, F. B. (2010). *Reformaing the Welfare State Recovery and Beyond Sweden*. Chicago: University of Chicago Press.
- Still Corporatism in Scandinavia? A Survey of Recent Findings*. (2000). Swedia: Scandinavian Political Studies.
- Sweden* . (2018, Juni 3). Retrieved from Sweden: <http://www.heritage.org/index/country/sweden>
- Sweden Economy*. (2018, Mei 8). Retrieved from Sweden Economy: <https://sweden.se/business/how-sweden-created-a-model-economy>
- Sweden Prosperity Index*. (2018, Mei 22). Retrieved from Prosperity Index: <http://www.prosperity.com/globe/sweden>
- Welfare State Retrenchment Revisted : Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies*. (2000). United Kingdom: World Politics.